



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2016 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, perlu disusun dan ditetapkan peta jalan (*road map*) reformasi birokrasi yang akan menjadi panduan bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan langkah-langkah nyata memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016-2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
 6. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2016-2019.

Pasal 1

Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016-2019 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 2

Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan melalui program-program:

- a. Manajemen Perubahan;
- b. Penguatan Pengawasan;
- c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- d. Penguatan Kelembagaan;
- e. Penataan Tata Laksana;
- f. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- g. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
- i. *Quick Wins*.

Pasal 3

Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh pejabat dan pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016 - 2019.

Pasal 4

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2016

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 614

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan
Hubungan Masyarakat,



Elen Setiadi, S.H., M.S.E.
NIP. 197109011996031001

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2016-2019

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN TAHUN 2016-2019

	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
			Output	Outcome		
1.	Manajemen Perubahan	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi / Tim Manajemen Perubahan / Agen-agen Perubahan	Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi / Tim Manajemen Perubahan / Agen-agen Perubahan	Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan	
		2. Penyusunan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Kemenko Bidang Perekonomian	<i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Kemenko Bidang Perekonomian 2016-2019		Tim AMP / Tim RB / Para KPI Manager	

	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
			Output	Outcome		
		3. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas (revolusi mental)	Pola pikir dan budaya kerja organisasi sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian			
		4. Sosialisasi / internalisasi kegiatan reformasi birokrasi	Laporan sosialisasi			
2.	Penguatan Pengawasan	1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Pengendalian internal atas pelaksanaan tugas dan fungsi (<i>assessment</i> resiko terhadap organisasi)	Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta ketaatan pada aturan	Inspektorat/ Tim AMP / Tim RB	
		2. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i>	APIP yang lebih berperan dalam melakukan mendorong peningkatan kepatuhan atas pengelolaan keuangan negara.	Meningkatnya kepatuhan pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan negara		
		3. Peningkatan kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP pada Level 3 (<i>integrated</i>)	Meningkatnya kualitas hasil audit intern		
		4. Peningkatan opini Badan Pengelola Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan	Meningkatnya opini BPK atau tetap dipertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Meningkatnya status opini WTP		

	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
			Output	Outcome		
		5. Menegakkan disiplin kerja	Laporan hasil evaluasi atas kebijakan disiplin kerja	Terwujudnya integritas pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian		
		6. Penerapan dan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Laporan hasil evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Menghilangkan praktek gratifikasi dalam pelaksanaan tugas		
		7. Penerapan dan evaluasi atas <i>Whistle Blowing System</i>	Laporan hasil evaluasi atas penanganan <i>Whistle Blowing System</i>	Bebas KKN dalam pelaksanaan tugas		
		8. Penerapan dan evaluasi atas kebijakan penanganan benturan kepentingan	Laporan hasil evaluasi atas kebijakan penanganan benturan kepentingan	Pencegahan benturan kepentingan		
		9. Pembangunan Zona Integritas	a. Piagam Pencanangan Zona Integritas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas organisasi		
			b. Laporan implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)			

	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
			Output	Outcome		
		10. Menegakkan kode etik	Laporan hasil evaluasi penerapan kode etik	Sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi pegawai sesuai Kode Etik yang berlaku		
3.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Pemantauan pencapaian kinerja oleh pimpinan secara berkala	Penggunaan sistem informasi dalam pemantauan kinerja (e-SKP /e-LAKIP berjalan)	Meningkatnya kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Para Pejabat Eselon I dan II	
		2. Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi	Sistem Manajemen Kinerja terpadu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi		Biro Perencanaan	
		3. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	a. Tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) b. Evaluasi periodik atas ketercapaian target IKU			
		4. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	a. Laporan kinerja Kementerian dan/atau unit organisasi			Laporan Kinerja B.03; B.06; B.09; B.12

	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
			Output	Outcome		
			b. Sistematika LAKIP dan isi LAKIP / Laporan Kinerja lainnya telah sesuai ketentuan			LAKIP didukung data kinerja
		5. Pelaksanaan reviu internal atas penyusunan laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	reviu internal		Inspektorat	
		6. Tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi reviu internal	Laporan hasil tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi reviu internal			
		7. Tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Laporan hasil tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi BPKP			
		8. Tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Laporan hasil tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi BPK			

	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
			Output	Outcome		
4.	Penguatan Kelembagaan	1. Redefinisi visi, misi, strategi	Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan terhindarnya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi	Tim AMP / Tim RB	
		2. Evaluasi dan restrukturisasi organisasi	a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Organisasi dan Tata Kerja			Permenko Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
			b. Terwujudnya organisasi dengan unit kerja yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi			
		3. Analisis Beban Kerja	Formulasi kebutuhan pegawai; efektivitas dan efisiensi unit kerja		Biro Perencanaan	

	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
			Output	Outcome		
		4. Peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas	Sarana dan prasarana kantor yang berkualitas		Biro Umum	
5.	Penataan Tata Laksana	1. Penyusunan Tatalaksana (<i>business process</i>) yang menghasilkan SOP: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan peta proses bisnis Kemenko Perekonomian b. Penyempurnaan, penerapan dan penyusunan SOP baru c. Melakukan <i>review</i> kesesuaian SOP yang telah ada sesuai perubahan organisasi dan tata kerja baru 2. Pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> :	1) Peta Bisnis Proses 2) SOP untuk masing-masing uraian jabatan / tugas dan fungsi yang disahkan 3) Standar Pelayanan	Terselenggaranya transparansi, akuntabilitas, dan standardisasi proses penyelenggaraan pemerintahan Meningkatnya penggunaan Teknologi Informasi dalam proses penyelenggaraan	Tim AMP / Tim RB	Koordinator: Biro Perencanaan

	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
			Output	Outcome		
		a. Melakukan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana serta aplikasi dan sistem informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan <i>e-government</i>	Rencana pengembangan <i>e-government</i> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	manajemen pemerintahan		
		b. Pembangunan aplikasi baru	Aplikasi baru yang telah dibangun			Aplikasi Persuratan: Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)
		c. Penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)				
		d. Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)	e-arsip			Penerapan Arsip Elektronik melalui SIKN dan JIKN
		e. penerapan Aplikasi Surat	aplikasi surat			
		f. Pemantauan dan evaluasi penerapan <i>e-government</i>	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi penerapan <i>e-government</i>			Penerapan <i>e-government</i> meliputi penggunaan <i>hardware</i> , <i>software</i> , jaringan dan <i>meatware</i>

	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
			Output	Outcome		
6.	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	1. Penyusunan <i>Road Map</i> Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Dokumen <i>Road Map</i> Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur	Tim AMP / Tim RB / Para KPI Manager	Unit Kerja Pelaksana: Biro Umum
		2. Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN	Tersusunnya sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN sesuai kebutuhan organisasi		Biro Umum	
		3. Analisis jabatan	Dokumen informasi jabatan dan Peta Jabatan		Biro Perencanaan	
		4. Evaluasi jabatan dan sistem remunerasi	Dokumen informasi faktor jabatan dan pengaturan tentang kelas jabatan dan tunjangan kinerja pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian			
		5. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai	Kertas kerja penilaian kinerja individu dan laporan hasil penilaian kinerja		Biro Umum	Berlaku untuk semua Pegawai ASN

	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
			Output	Outcome		
		6. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi	Tersedianya peraturan terkait pelaksanaan rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi serta akuntabel			
		7. Pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN:				
		a. Seleksi Terbuka Eselon I	Proses rekrutmen dan seleksi pegawai transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi	Diperoleh SDM aparatur yang transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel		
		b. Seleksi Terbuka Eselon II				
		c. rekrutmen CPNS				
		d. Seleksi Terbuka ASN (JFU golongan III/a)				
		e. Asesmen individu berdasarkan kompetensi	1) Tersedianya dokumen atau data base peta profil kompetensi individu	Terwujudnya profil kompetensi untuk masing-masing		

	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
			Output	Outcome		
			2) <i>Assessment Center</i>	jabatan di dalam organisasi dan tersedianya informasi secara komperhensif dan akuran profil kompetensi individu		
		8. Perumusan dan penetapan kebijakan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> berbasis kinerja	Tersedianya peraturan terkait kebijakan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> berbasis kinerja	Terwujudnya penerapan pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> berbasis kinerja		
		9. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja a. Pemetaan pendidikan dan pelatihan SDM b. Evaluasi pelaksanaan diklat yang selama ini dilakukan	Terbangunnya sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan <i>stakeholders</i>	Berjalannya sistem pendidikan dan pelatihan pegawai yang mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan		Diklat: 1. Rintisan Pendidikan Gelar 2. Diklat Teknis 3. Diklat Struktural 4. <i>Capacity Building</i> 5. <i>Short Course</i> Luar Negeri

	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
			Output	Outcome		
		10. Memperkuat pola rotasi, mutasi, promosi	Terwujudnya rencana pola rotasi, mutasi dan promosi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan berbasis kompetensi	Terwujudnya pola rotasi, mutasi, promosi dan karir yang mendukung implementasi reformasi birokrasi		
		11. Memperkuat pola karir	Terwujudnya rencana pola karir sesuai dengan kebutuhan organisasi dan berbasis kompetensi			
		12. Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	Tersedianya data / profil pegawai yang mutakhir dan akurat	Berjalannya sistem informasi pegawai yang akurat, transparan dan akuntabel		Penerapan dan pengembangan Aplikasi SIMPEG
		13. Menyusun laporan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai	Terwujudnya informasi nilai kinerja individu dan bahan rencana penataan pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian		

	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
			Output	Outcome		
		14. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada Kementerian PAN dan RB	100% ASN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan LHKASN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Transparansi dan akuntabilitas kepemilikan harta kekayaan ASN		
7.	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Memetakan, mengoordinasikan dan mensinkronkan regulasi/deregulasi dan regulasi baru	a. Teridentifikasinya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kemenko Perekonomian b. Tersedianya peta regulasi yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Kemenko Perekonomian c. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi regulasi/deregulasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya perundang-undangan di bidang perekonomian yang sinkron dan harmonis	Biro Hukum, Persidangan, dan Humas	
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Pengelolaan Informasi Publik 2. Penerapan standar pelayanan pada unit kerja	Terimplementasinya penggunaan standar pelayanan dalam pelayanan publik dan <i>stakeholders</i>	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih aman, lebih baik dan lebih terjangkau)	PPID / Tim AMP / Tim RB	Pengelolaan website www.ekon.go.id

	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
			Output	Outcome		
		3. Peningkatan komunikasi publik	a. Strategi kehumasan terkait peningkatan kinerja organisasi b. Dokumen <i>award</i> / penghargaan yang diperoleh			
		4. Penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (<i>e-procurement</i>)	https://lpse.lkpp.go.id/			
		5. Penerapan inovasi dalam pelayanan publik	Inovasi layanan			Unit Kerja Pelaksana Layanan (Pengelola Inovasi Layanan)
		6. Tindak lanjut atas rekomendasi Ombudsman RI atas pelayanan publik	Laporan hasil tindak lanjut atas rekomendasi Ombudsman RI atas pelayanan publik			
		7. Pembentukan Unit Pengelola Pengaduan	Unit Pengelola Pengaduan			

	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
			Output	Outcome		
		8. Pengintegrasian sistem pengelolaan pengaduan masyarakat ke dalam aplikasi LAPOR	Terwujudnya kesatuan integrasi pengelolaan pengaduan masyarakat atas pelayanan publik			
		9. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Laporan hasil pelaksanaan FGD / sosialisasi kebijakan di bidang perekonomian	Meningkatnya kualitas kebijakan di bidang perekonomian	Unit Kerja Pelaksana/ Deputi	
9.	Quick Wins (Percepatan Pelayanan)	1. Menyusun rencana kinerja <i>Quick Wins</i>	Dokumen rencana kinerja <i>Quick Wins</i>	Meningkatnya kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Tim AMP / Tim RB dan Unit Kerja Pelaksana <i>Quick Wins</i>	
		2. Melaksanakan <i>Quick Wins</i>	Laporan kinerja <i>Quick Wins</i>			
10.	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Reformasi Birokrasi	1. Monitoring	Tersedianya laporan monitoring	Meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Tim AMP / Tim RB	
		2. Evaluasi	Tersedianya laporan evaluasi tahunan			

	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
			Output	Outcome		
		a. Menyusun laporan kinerja Tim Asistensi Manajemen Perubahan / Tim Reformasi Birokrasi	Tersedianya laporan kinerja tim urusan reformasi birokrasi termasuk manajemen perubahan			
		b. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Hasil PMPRB			

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DARMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan
Hubungan Masyarakat,



Elen Setiadi, S.H., M.S.E.
NIP. 197109011996031001

PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2016-2019

[illegible]

[illegible]

[illegible]

